

Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia

Oleh Loekman Soetrisno

Golongan menengah di Indonesia mengalami masa pasang-surut sejak zaman penjajahan. Peranan ini pernah beralih di ke tangan kapitalis pariah Cina, yang mendapat kesempatan menjadi golongan menengah dari pemerintahan di masa itu. Kapitalis pariah ini terus berperan sampai sekarang. Namun sejak awal tahun 1960-an pergeseran mulai terjadi. Golongan menengah yang memiliki berbagai fasilitas mulai mengimbangi peranan kapitalis pariah ini. Hanya saja, menurut Loekman Soetrisno, peranan golongan menengah di Indonesia sebagai kelompok pembaru masih sulit diharapkan, karena panjangnya birokrasi menghambat gerak mereka.



Mengkaji negara-negara sedang berkembang saat ini, para ahli barat selalu menyebutkan bahwa tidak adanya golongan kelas menengah dalam negara-negara tersebut merupakan salah satu faktor penyebab keterbelakangan. Pendapat ini dapat dibenarkan, khususnya bila kita bandingkan dengan perkembangan negara-negara Barat. Di negara-negara Barat peranan golongan menengah ini memang sangat besar dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik di benua tersebut. Hal ini karena perbedaan sejarah antara negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara Barat, sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui peranan kelas menengah di negara yang sedang berkembang dalam proses pembangunan negara, dibandingkan dengan peranan sejawat mereka di negara-negara Barat.

Dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang, di dalam sejarah perkembangannya negara-negara Barat tidak pernah mengalami suatu distorsi dari suatu kekuatan ekonomi-politik yang datang dari luar. Mereka tak pernah mengalami suatu masa penjajahan, sehingga proses evolusi perkembangan negara-negara tersebut tidak mengalami hambatan. Sebaliknya, pada

umumnya negara-negara sedang berkembang adalah negara-negara bekas jajahan negara-negara Barat. Kolonialisme merupakan faktor sangat penting yang menghambat negara-negara sedang berkembang mengikuti perkembangan evolusioner secara normal. Hal ini menimbulkan beberapa akibat tertentu dalam negara-negara tersebut termasuk "jenis" dan "orientasi sosial politik" dari 'kelas menengah' yang dimiliki masyarakat negara-negara yang sedang berkembang.

Tulisan ini bertujuan mengkaji pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam golongan 'menengah' di Indonesia dalam konteks sejarah perkembangan golongan ini di negara kita.

Munculnya Kapitalis Pariah

Seperti halnya di negara-negara sedang berkembang lainnya, proses perkembangan golongan menengah di Indonesia juga sangat dipengaruhi perkembangan kolonialisme di negeri ini. Kolonialisme Belanda menciptakan dua jenis "golongan menengah" di Indonesia, di samping mematikan 'embrio-embrio' golongan menengah yang ada dalam masyarakat, yakni para pedagang samudera dan para pengrajin industri kecil.

Jenis "golongan menengah" pertama yang

diciptakan pejabat kolonial Belanda adalah apa yang kita kenal dengan golongan kapitalis pariah. Mereka ini diciptakan pemerintah Belanda untuk memegang fungsi 'perantara', sebagai penghubung pedagang Belanda — yang bertempat tinggal di daerah pantai — dengan produsen hasil pertanian di daerah pedesaan. Di Indonesia, *pariah capitalist* ini berada di tangan suku bangsa Cina. Semula, mereka ini bergerak dalam bidang perdagangan kecil seperti sebagai pedagang kelontong, pedagang pengumpul hasil bumi, rentenir dan sebagainya. Ketekunan kerja serta fasilitas-fasilitas yang mereka terima dari pemerintah Belanda pada waktu itu, membuat mereka dapat mendominasi sektor perdagangan di Indonesia.

Jenis golongan menengah kedua yang diciptakan pemerintah Belanda ialah golongan menengah yang terdiri dari golongan birokrat dan para *westernized intellectual*. Golongan ini pada mulanya secara ideologis sama halnya dengan *pariah capitalist*, merupakan pengagum keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Barat dalam membangun negara mereka. Kekaguman golongan ini terhadap bangsa Baratlah yang menyebabkan hubungan mereka sangat erat dengan kekuatan kolonial Belanda.

Pada hakekatnya ada satu perbedaan yang mendasar antara kapitalis pariah dan golongan pegawai dan cendekiawan di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Perbedaan tersebut terletak pada persepsi mereka terhadap peranan pemerintah kolonial Belanda dan terhadap kelangsungan kehidupan mereka masing-masing. Sebagai pedagang dan orang asing di Indonesia para *pariah capitalist* ini melihat pemerintah Belanda sebagai bukan hanya pemberi makan tetapi juga pelindung politik bagi golongan ini. Tidak demikian halnya dengan golongan kelas menengah pegawai. Mereka ini, walaupun mengagumi apa saja yang berbau Belanda dan Barat, masih melihat adanya ketidakadilan perlakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Ketidakadilan tersebut mereka rasakan dalam hal gaji dan fasilitas, yang menurut mereka lebih rendah dari gaji dan fasilitas yang diterima para pegawai Belanda asli. Di kalangan para pegawai menengah pribumi ketidakadilan ini menyebabkan tim-

bulnya pemikiran bahwa mereka akan dapat menikmati gaji dan fasilitas yang dinikmati pegawai-pegawai Belanda, seandainya pemerintah kolonial dapat diusir dari negeri ini. Motivasi inilah yang kemudian mendorong timbulnya rasa nasionalisme dalam golongan ini. Golongan ini kemudian menjadi pimpinan gerakan nasionalisme di Indonesia.

Seperti telah diuraikan, kolonialisme mematikan 'embrio-embrio' yang dapat berkembang menjadi suatu golongan menengah yang benar-benar golongan menengah di Indonesia. 'Embrio-embrio' ini terdiri dari para saudagar Indonesia yang aktif dalam perdagangan laut, para artisan dan petani kaya. Namun peranan mereka dalam perekonomian Indonesia hilang sejak kekuatan kolonial Portugal dan Belanda berhasil menguasai pelayaran samudera di Indonesia. Dengan dikuasainya pelayaran samudera oleh bangsa Belanda dan dengan semakin lajunya penetrasi kapitalisme dunia di Indonesia, peranan mereka semakin tak terarah. Dari pedagang besar yang mandiri mereka berubah menjadi pedagang pengecer yang sangat tergantung pada golongan *pariah capitalist* yang semakin kuat kedudukannya dalam sistem perekonomian Indonesia. Nasib yang sama terjadi pula pada golongan pengrajin (artisan) dan para petani kaya di Indonesia. Impor barang-barang industri dari negeri Belanda, khususnya tekstil, telah mematikan usaha-usaha para pengrajin Indonesia. Dengan matinya usaha-usaha mereka, para pengrajin ini banyak yang harus memburuh atau bertani. Sementara itu proses proletarisasi mulai melanda daerah pedesaan. Penetrasi kapitalisme di desa-desa di Jawa dengan pabrik-pabrik gulanya telah mencegah timbulnya kelas menengah di kalangan masyarakat pertanian Jawa. Politik pertanian Belanda yang mendukung perkembangan pabrik gula di Jawa mengakibatkan petani Jawa muncul sebagai "kelas kuli" seperti tercermin pada istilah "kuli *kenceng*" dan "kuli *kendo*". Kata "kuli" pada hakekatnya bukanlah kata Jawa melainkan datang dari kata Inggeris *coolie* yang berarti orang yang "menjual tenaganya". Dengan demikian penggunaan kata "kuli" pada kuli *kenceng* dan kuli *kendo* merefleksikan suatu penurunan derajat sosial ekonomis para petani dalam kaitan dengan usaha-usaha kapitalis Belanda.

Secara teoritis, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia pascakolonial tidak memiliki suatu kelas menengah di dalam artian yang sebenarnya, yaitu satu kelompok manusia Indonesia yang benar-benar merdeka dalam pandangan politik dan memiliki kekuatan ekonomi yang mandiri dan menentukan. Dari segi ini maka golongan menengah yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yaitu *pariah capitalist* dan kelas birokrat dan intelektual bukanlah satu kelas menengah yang murni.

Kerjasama Kapitalis Pariah dengan Menengah Pribumi

Pada dekade pertama dari kemerdekaan politik Indonesia komposisi 'golongan menengah' di Indonesia tidak banyak berubah seperti apa yang diwariskan oleh pemerintah Belanda. Komposisi 'golongan menengah' di Indonesia mulai mengalami pergeseran menjelang tahun 1960-an. Pergeseran ini ditandai oleh dua hal; *Pertama*, munculnya ABRI, khususnya Angkatan Darat sebagai kekuatan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memberikan kesempatan pada perwira-perwira Angkatan Darat untuk menjadi manajer dalam perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya dalam bidang usaha perkebunan. *Kedua*, munculnya pengusaha-pengusaha dari anggota partai politik yang memperoleh lisensi dari pimpinan-pimpinan partai politik yang menguasai departemen atau kementerian yang basah. Dengan dalih untuk mengumpulkan dana partai, lisensi kemudian dibagikan kepada simpatisan partai yang sedang berkuasa. Lisensi ini oleh sebagian besar anggota partai politik dijadikan suatu cara untuk mendirikan perusahaan mereka atau menumpuk kekayaan. Keadaan tersebut mengakibatkan perusahaan dalam posisi 'golongan menengah' di Indonesia. Banyaknya tenaga ABRI yang memegang jabatan sipil turut mengubah komposisi golongan birokrasi kita, sehingga golongan ini tidak lagi terdiri dari golongan birokrat sipil murni tetapi juga meliputi tenaga-tenaga yang datang dari kalangan ABRI. Di samping itu muncul pula pedagang besar nasional yang terdiri dari mereka-mereka yang berhasil

memperoleh modal melalui keanggotaannya dalam suatu partai politik.

Sebenarnya yang lebih menarik adalah perubahan komposisi 'golongan menengah' dari segi kekuatan ekonomis yang ada dalam masyarakat kita. Dekade 1960-an ditandai dengan *kaburnya* perbedaan antara kapitalis pariah dengan 'golongan menengah birokrat' yang pada zaman kolonial nampak terpisah. Kesempatan para anggota birokrasi sipil dan anggota ABRI untuk menduduki posisi pimpinan perusahaan negara, serta adanya sistem lisensi, menimbulkan kesempatan bagi beberapa anggota birokrasi sipil dan anggota ABRI mengakumulir modal. Namun, walaupun memiliki modal, para birokrat ini tidak memiliki pengetahuan manajemen untuk dapat menginvestasikan modal mereka dalam suatu usaha. Hal ini mendorong mereka untuk bekerjasama dengan golongan kapitalis pariah di negara kita.

Kerjasama antara dua 'golongan menengah' tersebut pada dasarnya merupakan satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Golongan birokrat bermodal memperoleh bantuan dari pihak kapitalis pariah berupa pengetahuan manajemen dan pemasaran sedang para *kapitalis pariah* memperoleh bantuan perlindungan politik dan fasilitas usaha dari para birokrat. Gabungan antara dua golongan menengah ini menjadi kekuatan ekonomi yang dominan di Indonesia pada masa pemerintahan rezim Orde Lama, di samping perusahaan-perusahaan yang didirikan pemerintah sebagai akibat dari nasionalisasi perusahaan Belanda.

Apabila masa kemerdekaan telah menimbulkan suatu aliansi ekonomis antara golongan kapitalis pariah dan golongan birokrat kaya, maka perubahan tidak banyak terjadi pada golongan "embrio kelas menengah murni" di Indonesia. Nasib para pedagang kecil dan para pengrajin nasional tidak banyak berubah. Seperti masa kolonialisme ruang gerak mereka sebagai pengusaha maupun pengrajin tetap terbatas pada usaha-usaha perdagangan penyalur dan tetap tergantung pada golongan *pariah capitalist*. Pada waktu itu hal ini dapat dilihat dari ketergantungan para pengusaha batik nasional pada golongan kapitalis pariah yang

"menguasai" impor bahan baku yang dibutuhkan pengusaha pabrik batik. Munculnya gabungan birokrat bermodal dan golongan kapitalis pariah sebagai kekuatan ekonomi di dalam masyarakat Indonesia menyebabkan, secara ekonomis para pedagang kecil nasional lebih terpojok, karena para birokrat bermodal ini sering memegang kedudukan kunci dalam jawatan atau dinas-dinas yang erat hubungannya dengan pengelolaan perekonomian Indonesia. Keadaan ini mempersulit pedagang kecil nasional menembus 'kebijaksanaan-kebijaksanaan' yang diciptakan para birokrat bermodal untuk melindungi usaha gabungan mereka dengan *pariah capitalist*. Adanya partai politik tidak dapat membantu para "embrio kelas menengah murni" ini karena banyak pimpinan partai politik pada waktu itu yang ikut aktif dalam pemupukan modal, baik untuk kepentingan partai mereka masing-masing maupun untuk kepentingan pribadi.

Membantu para pedagang kecil dan para pengrajin, waktu itu pemerintah menganjurkan mereka membentuk koperasi dan organisasi perusahaan-perusahaan sejenis. Pemerintah berharap, dengan adanya organisasi ini kedudukan ekonomis mereka akan bertambah kuat. Maksud pemerintah tersebut tak tercapai karena tiada ada dukungan dari aparat pelaksana yang ditugaskan untuk mengembangkan potensi ekonomis golongan ini. Aparat pemerintah cenderung untuk lebih senang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar karena mereka ini merupakan sumber pendapatan bagi mereka.

Birokrasi yang Memandulkan Golongan Menengah

Munculnya pemerintahan Orde Baru merupakan titik balik dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang kemudian mempengaruhi perkembangan selanjutnya dari "golongan menengah" di negara kita. Apabila pada masa Orde Lama modal asing tidak mempunyai peranan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka munculnya Orde Baru diikuti dengan masuknya modal asing sebagai unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Munculnya modal asing menimbulkan perubahan dalam "golongan menengah" di Indonesia. Apabila

pada masa Orde Lama pola aliansi ekonomi yang dominan adalah pola aliansi birokrat bermodal dan unsur kapitalis pariah, dengan masuknya modal asing di negara kita aliansi tersebut menjadi lebih bervariasi. Aliansi ekonomi tidak lagi terbatas antara birokrat bermodal dan unsur kapitalis pariah, tetapi aliansi dapat terjadi antara birokrat bermodal dengan modal asing ataupun antara *pariah capitalist* dengan modal asing. Di samping aliansi ini masih ada pengusaha besar nasional yang bergerak di luar aliansi ini. Mereka-mereka ini adalah pengusaha eks birokrat, pengusaha yang dulu memperoleh dukungan suatu partai politik tertentu, dan beberapa pengusaha eks kapitalis pariah yang berhasil mengakumulir modal dalam jumlah besar selain mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Mereka ini bersama aliansi-aliansi tersebut di atas menjadi kekuatan ekonomis baru dalam masyarakat Indonesia.

Suatu fenomena menarik yang timbul dalam masyarakat Indonesia dalam masa Orde Baru selain munculnya modal asing dan perubahan-perubahan pada aliansi-aliansi ekonomi adalah munculnya pengusaha-pengusaha muda nasional, para konsultan dan sebagainya. Para pengusaha-pengusaha muda nasional ini pada umumnya putera-puteri dari para birokrat yang bermodal atau mereka-mereka yang mempunyai hubungan yang dekat dengan para birokrat yang memegang kekuasaan di pusat dan di daerah. Sedangkan para konsultan terdiri dari para ahli yang disewa oleh pemerintah untuk bekerja dalam berbagai proyek pembangunan. Munculnya golongan ini erat hubungannya dengan kenaikan anggaran belanja pemerintah sebagai akibat kenaikan pendapatan pemerintah dari ekspor minyak.

Modal asing dan kenaikan harga ekspor minyak menyebabkan ekonomi nasional Indonesia berkembang cepat. Cepatnya perkembangan ekonomi Indonesia ini telah mendorong timbulnya "golongan menengah" yang ingin mengisi kesempatan-kesempatan usaha yang tercipta. Yang menjadi pertanyaan adalah, dapatkah "golongan menengah" di Indonesia ini berfungsi sebagai golongan pembaru, seperti halnya golongan menengah di Eropa pada masa-

masa permulaan pembangunan benua tersebut.

Suatu hal yang tidak mengalami perubahan dalam kehidupan perekonomian Indonesia dengan munculnya Orde Baru di Indonesia adalah peranan pemerintah. Dominasi peranan pemerintah dalam perekonomian nasional dapat kita lihat dari keharusan setiap pemilik modal yang ingin berusaha untuk memperoleh izin usaha dari pemerintah. Adanya peraturan tersebut sangat mempengaruhi kemungkinan berkembangnya "golongan menengah" yang ada pada saat ini menjadi satu golongan pembaru di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Satu syarat utama untuk menjadikan "golongan menengah" di Indonesia menjadi golongan pembaru adalah "kemandirian" mereka terhadap hubungan mereka dengan pemerintah. Dominasi pemerintah dalam kehidupan perekonomian Indonesia menyebabkan timbulnya hubungan "ketergantungan yang permanen" golongan menengah kepada pemerintah. Walaupun bila dilihat dari segi modal beberapa pengusaha besar nasional kita dapat dikatakan sudah mandiri, kebebasan mereka masihlah terbatas karena untuk melestarikan usahanya masih tergantung pada berbagai izin yang dikeluarkan pemerintah. Melalui kekuasaan memberi izin usaha pada dasarnya pemerintah dapat "menyeleksi" jenis maupun pengusaha yang dapat mengembangkan usahanya. Hal ini memaksa para pengusaha Indonesia untuk selalu "loyal" pada pemerintah dalam artian "bersikap pasif" terhadap problematik sosial, ekonomis dan politik yang timbul dalam masyarakat kita sebagai akibat dari suatu kebijaksanaan pemerintah. Para pengusaha besar nasional yang bergabung dalam organisasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) jarang mengeluarkan suatu pendapat perihal ketimpangan sosial, ekonomi ataupun politik yang ada di negara kita. Terasa bahwa KADIN sebagai wadah dari pengusaha nasional Indonesia hanya memperjuangkan kepentingan golongan mereka terlepas dari kepentingan rakyat pada umumnya.

Di samping itu kemandulan golongan ini dalam mentransformasikan diri mereka menjadi golongan pembaru disebabkan latarbe-

lakang sosial dari pengusaha-pengusaha tersebut. Kebanyakan pengusaha nasional yang dominan di Indonesia adalah eks birokrat tinggi, perwira-perwira ABRI atau putera-putera mereka atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan para pejabat di pemerintahan. Jelas, mereka bukanlah merupakan orang-orang *entrepreneur*. Hal ini menyebabkan orientasi ekonomi, sosial maupun politik mereka tidak akan mungkin berbeda dengan pemerintah. Usaha dari pihak pengusaha untuk mempunyai pandangan ekonomi, sosial maupun politik yang berbeda dari pemerintah akan berarti tertutupnya lapangan usaha mereka. Suatu resiko yang dihindari para pengusaha tersebut.

Keadaan ini menyebabkan semakin kuatnya kedudukan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia, dan semakin pudar pula kemungkinan golongan menengah di Indonesia menjadi golongan pembaru. Bahkan kemandulan mereka sebagai golongan pembaru dalam masyarakat Indonesia menyebabkan mereka "terasing" dari rakyat.

Keterasingan golongan ini dimulai dari pola hidup mereka yang sangat konsumtif di tengah-tengah kehidupan rakyat yang masih serba terbatas. Perbedaan pola hidup golongan ini dengan rakyat di sekeliling mereka, serta tidak adanya keberanian politik golongan ini untuk memberikan alternatif kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang lebih baik daripada yang telah ada, menyebabkan rakyat tidak melihat manfaat kehadiran mereka dalam masyarakat.

Rakyat kebanyakan tetap melihat golongan ini sebagai orang kaya baru dan bukan sebagai golongan menengah ataupun sebagai golongan pembaru. Golongan orang kaya baru ini oleh rakyat masih dianggap sebagai "benalu" yang menghalangi terjadinya pemerataan hasil pembangunan di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi golongan menengah Indonesia untuk mengubah diri mereka sebagai golongan pembaru berasal dari kaitan mereka dengan kapitalisme internasional. Para kapitalis internasional yang di Indonesia diwakili oleh pemilik modal asing pasti tidak menginginkan pemilik modal nasional berkembang sebagai

kekuatan tandingan bagi mereka, walaupun golongan ini menjadi rekan usaha mereka di Indonesia. Untuk mencegah golongan ini berkembang menjadi saingan para pemilik modal asing enggan untuk mengalihkan teknologi yang mereka miliki kepada pengusaha yang menjadi rekan usaha mereka. Akibatnya para pengusaha nasional yang terkait dengan kapitalisme internasional ini hanya menduduki kedudukan pendamping yang tidak mempunyai kekuasaan dalam mengatur kebijaksanaan perusahaan. Kedudukan *junior partner* bagi seorang *entrepreneur* yang murni akan merisaukan, namun karena sebagian besar pengusaha nasional kita bukan *entrepreneur* maka apakah mereka menjadi *junior partner* atau rekan usaha penuh bagi mereka bukanlah menjadi persoalan. Yang penting bagi mereka adalah lancarnya keuntungan yang mereka terima dari *senior partner* mereka, karena keuntungan ini dapat mereka gunakan untuk menopang kehidupan mereka yang konsumtif. Dari segi ini para pengusaha nasional hanya melestarikan fungsi *pariah capitalist* pada masa kolonialisme Belanda. Lantas dapatkah golongan intelektual menjadi golongan menengah yang murni di Indonesia?

Keadaan kaum intelektual, khususnya mereka yang bekerja di universitas, nampak tidak banyak berbeda dengan para pengusaha. Apabila para pengusaha menjadi pasif terhadap problematik sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam masyarakat Indonesia karena ketergantungan mereka terhadap pemerintah, hal yang serupa pun terjadi dengan golongan intelektual kita.

Di dalam salah satu ceramah di kampus Universitas Gadjah Mada telah saya singgung adanya suatu gejala *self-imposed censorship* dalam masyarakat ahli kita. *Self-imposed censorship* ini dimanifestasikan dengan keengganan mereka untuk menulis, khususnya tentang sesuatu yang berbeda dengan 'arus' yang dominan.

Self-imposed censorship ini menurut hemat saya erat hubungannya dengan rasa takut dari para ahli kita terhadap sanksi yang mungkin akan mereka peroleh apabila mereka menulis sesuatu yang dianggap sebagai suatu kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah. Demi keselamatan karir, mereka

(para ahli Red) lebih senang menulis sesuatu yang sangat ilmiah sehingga masyarakat awam tidak mengerti apa yang mereka tulis, atau menulis sesuatu dengan menggunakan 'data-data karbitan' yang dapat menyenangkan semua pihak walaupun dengan demikian mereka terpaksa harus mengurbankan integritas mereka sebagai seorang cendekiawan. Dampak dari hal ini dapat kita lihat dengan kurangnya masukan yang benar-benar obyektif dari para ahli untuk membantu pemerintah menyelesaikan problematik pembangunan di negara kita. Bahkan sering terjadi, di dalam menyusun program pembangunannya pemerintah mengalami kegagalan karena analisa-analisa ataupun saran-saran yang diberikan para ahli kita hanya menyajikan data-data yang selektif, berupa data-data yang lebih 'menyenangkan' sambil menghilangkan data-data 'pahit' yang dapat menyebabkan para ahli menanggung konsekuensi yang tidak mereka harapkan. Keadaan ini sering dilakukan oleh para sarjana sosial yang ditugaskan melaksanakan penelitian ataupun suatu evaluasi terhadap program-program pembangunan di negara kita.

Di kalangan para peneliti/ahli ilmu sosial di Indonesia dikenal suatu strategi penelitian yang diberi nama populer 'besutan' atau 'penghalusan' dalam penulisan laporan. Di dalam proses 'besutan' ini para peneliti berusaha menjauhkan diri dari analisa-analisa maupun kata-kata yang di kalangan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa pandangannya bertentangan dengan kebijaksanaan strategi pembangunan yang dominan. Sebagai contoh umpamanya, pada umumnya para peneliti/ahli ilmu sosial di dalam laporan penelitian tidak berani mengatakan bahwa suatu program 'tidak berhasil'. Demi karir atau demi memperoleh proyek penelitian baru, mereka ini mungkin akan mengubah kata 'tidak berhasil' tersebut menjadi 'belum berhasil', tanpa menyadari dampak kata-kata tersebut pada kemungkinan keberhasilan program itu sendiri. Padahal, dengan menggunakan kata 'tidak berhasil' akan memaksa pengelola program pembangunan tersebut untuk mencari strategi baru agar program tersebut lebih berhasil. Hal ini akan sangat berbeda dengan apabila kita menggunakan kata 'belum berhasil', karena tidak ada

unsur psikologis yang memaksa para pengelola pembangunan mengadakan otokritik.

Akibat dari proses 'besutan' ini banyak penelitian-penelitian ilmu sosial di Indonesia yang tidak dapat memberikan alternatif baru bagi pengelola pembangunan, sehingga penelitian tersebut hanyalah bersifat *white-washing research* yang 'membenarkan' saja suatu program pembangunan dan bukan penelitian yang berusaha mencari kebenaran yang obyektif. Keadaan inilah yang menyebabkan program seperti transmigrasi umpamanya sampai saat ini masih terus mengalami hambatan karena hasil penelitian tentang programnya telah 'dibesut' para peneliti.

Keadaan tersebut tidak dapat disalahkan seluruhnya kepada para peneliti. Situasi memang tidak mengizinkan mereka untuk bertindak terlalu jujur. Hal ini juga tidak mengembirakan bagi para ahli ilmu sosial sendiri, karena mereka harus menderita konflik batin antara mengatakan yang benar seperti yang dituntut oleh profesi mereka, atau mengatakan hal-hal yang tidak benar yang secara tidak langsung akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan di

negara kita. Hal ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi para ahli, dan merupakan kehidupan intelektual yang tidak sehat.

Dalam keadaan yang serba dilematis ini, integritas para intelektual Indonesia benar-benar diuji. Bagi mereka yang lemah terhadap tekanan-tekanan tersebut akan dengan cepat menjadi apatis terhadap problematik sosial, ekonomi dan politik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sebagai akibat dari pembangunan di negara kita. Keadaan ini akan membahayakan masa depan bangsa ini karena bangsa ini nantinya akan memiliki golongan intelektual yang bermental 'kancil', yang mau melakukan apa saja demi kepentingan dan keselamatan pribadinya, walaupun untuk itu mereka harus mengorbankan integritas intelektual mereka.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia selama pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan pergeseran-pergeseran dalam komposisi 'golongan menengah' di Indonesia. Namun karena berbagai alasan golongan ini belum dapat berfungsi sebagai kelas pembaru di Indonesia.

